

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kebuntuan normatif dan prosedural di tingkat nasional yang mempersulit wacana penyelesaian pelanggaran HAM berat Peristiwa 1965/1966. Sebagai upaya untuk keluar dari stagnasi wacana penyelesaian Peristiwa 1965/1966, penelitian ini menawarkan model penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui inisiatif lokal Pemerintah Daerah. Penelitian ini secara prospektif mendorong Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan inisiatif lokal penyelesaian Peristiwa 1965/1966. Penelitian ini meneliti bagaimana pelanggaran HAM berat yang terjadi di Boyolali pada Peristiwa 1965/1966 dan bagaimana bentuk kewajiban negara berbasis inisiatif lokal yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada para korban Peristiwa 1965/1966. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosio-legal dengan spesifikasi penelitian yakni deskriptif-preskriptif. Metode pendekatan sosio-legal dipilih untuk membuat penelitian menjadi lebih kreatif, kombinatorik-interdisipliner, dan membebaskan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan metode kualitatif sebagai metode analisis data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa didapatkan fakta-fakta hukum berupa pembunuhan, pemusnahan, kerja paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, penganiayaan (persekusi), dan penghilangan paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi di Boyolali pada Peristiwa 1965/1966. Adanya dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Kabupaten Boyolali pada Peristiwa 1965/1966 selanjutnya menuntut Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai representasi dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewajibannya atas HAM kepada para korban. Secara prospektif, penyelesaian Peristiwa 1965/1966 oleh Pemerintah Kabupaten berada dalam bingkai inisiatif lokal, diantaranya berupa pencarian kebenaran, langkah legislatif dan praktis pemenuhan hak korban, implementasi konsep Kabupaten/Kota HAM, rekonsiliasi lokal, serta pendidikan HAM dan konteks Peristiwa 1965/1966 di kurikulum pendidikan sekolah.

Kata Kunci: **Peristiwa 1965/1966, Kewajiban Negara, Inisiatif Lokal.**

## **ABSTRACT**

*This research is backgrounded by a variety of normative and procedural deadlocks at the national level that complicate the discourse of resolving gross human rights violations of the 1965/1966 Event. In an effort to get out of the stagnation of the discourse on the settlement of the 1965/1966 Event, this research offers a model of resolving past gross human rights violations through the local initiative of the Regional Government. This research prospectively encouraged the Boyolali District Government to carry out local initiatives to resolve the 1965/1966 Event. This research examines how the gross human rights violations that occurred in Boyolali on the 1965/1966 Event and what forms of state obligation based on local initiatives that can be carried out by the Boyolali District Government to the victims of the 1965/1966 Event. This research uses the socio-legal research approach with the research specification that is descriptive-prescriptive. The socio-legal approach method was chosen to make this research more creative, combinative-interdisciplinary, and liberating. The data used in this study are primary data and secondary data with qualitative methods as analysis data methods. The results of the study showed that legal facts were obtained in the form of murder, extermination, forced labor, deprivation of liberty, torture, ill-treatment (persecution), and enforced disappearance as crime against humanity had occurred in Boyolali on the 1965/1966 Event. The alleged violation of gross human rights that occurred in Boyolali on the 1965/1966 Event then demanded that the Boyolali District Government represent the Central Government to carry out its obligations on human rights of the victims. Prospectively, the completion of the 1965/1966 Event by the Regency Government is within the framework of local initiatives, including in the form of truth seeking, legislative and practical steps to fulfill victims' rights, implementation of the human rights cities concept, local reconciliation, also human rights education and the context of the 1965/1966 Event in schools education curriculum.*

**Keywords:** *1965/1966 Event, State Obligations, Local Initiatives.*